



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan

Telp. (0343) 744122 – 744123 Fax. (0343) 748297

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra

Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan Pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perubahan Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perubahan Rencana kerja tahunan merupakan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra OPD maupun, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja OPD merupakan produk perencanaan pada Unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Perubahan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Perubahan renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

3. Penyusunan Perubahan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Perubahan renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Perubahan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Perubahan Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Perubahan Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menyusun dokumen Perubahan Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Percepatan Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tanggal 31 Maret 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan.
30. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan tiga tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah:

1. Perubahan Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Perubahan Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan Sitematika sebagai beikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi Perubahan Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya: Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ; Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur; Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada; Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: Tersedianya anggaran operasional yang cukup. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya; Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang

dibutuhkan kegiatan kedewanan; Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD turun dari yang semula sebesar Rp. 117.719.779.338,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi Rp. 91.838.904.453,- ada penurunan sebesar Rp. 25.880.874.885,-. Hal ini disebabkan karena regulasi efisiensi.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				tidak ada	tidak ada																		
		Bidang Urusan Sekretariat DPRD						DPA MURNI																	
	Meningkatnya kualitas	1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang	95	50.680.703.800			100	65.773.870.000	95	11.182.897.696	93	5.077.971.735	0	-	0	-	95	16.260.869.431	1,0	0,2	100,0	65.773.870.000	1,1	1,3

	layana n kepad a DPRD		terlaksana																					
		1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80	1.851.5 60.800		8 2	678.14 5.000	2 3	126.08 5.300			0	-	0	-	2 3	126.08 5.300	0,3	0,2	82 ,0	678.14 5.000	1,0	0,4
		1 Penyusunan dan Pembahasa n Program Pembentuka n Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusuna n dan Pembahasa n Program Pembentuk an Peraturan Daerah	12	926.56 0.800		1 2	43.845. 000	3	-			0	-	0	-	3	-	0,3	-	12 ,0	43.845. 000	1,0	0,0
		2 Pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah	0	-		1 2	324.30 0.000	3	126.08 5.300			0	-	0	-	3	126.08 5.300	0,3	0,4	12 ,0	324.30 0.000	#DI V/ 0!	#DI V/ 0!
		3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusuna n Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	780.00 0.000		1 2	260.00 0.000	3	-							3	-	0,3	-	12 ,0	260.00 0.000	1,0	0,3

		4 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	145.00 0.000			1	50.000. 000	0	-					0	-	-	-	1, 0	50.000 .000	1,0	0,3		
		2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pengesaha n APBD Tepat Waktu	95	2.690.3 35.000			9 7	1.347.4 50.000	2 5	-			0	-	0	-	2 5	-	0,3	-	97 ,0	1.347. 450.00 0	1,0	0,5
		1 Pembahasa n KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n KUA dan PPAS	1	145.00 0.000			1	163.00 0.000	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	1, 0	163.00 0.000	1,0	1,1
		2 Pembahasa n Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	135.00 0.000			1	161.00 0.000	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	1, 0	161.00 0.000	1,0	1,2
		3 Pembahasa n APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n APBD	28	2.000.0 00.000			1	368.70 0.000	4	-							4	-	4,0	-	1, 0	368.70 0.000	0,0	0,2
		4 Pembahasa n APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n APBD Perubahan	1	135.00 0.000			1	371.95 0.000	0	-							0	-	-	-	1, 0	371.95 0.000	1,0	2,8
		5 Pembahasa n Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasa n Pertanggun gjawaban APBD	1	275.33 5.000			1	282.80 0.000	0	-							0	-	-	-	1, 0	282.80 0.000	1,0	1,0

		3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	275.000.000		100	549.050.000	25	27.818.694	100	499.000.000				25	526.818.694	0,3	1,0	100,0	549.050.000	1,0	2,0
		1	<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	1	140.000.000		1	20.250.000	0	-			0	-	0	0	-	-	-	1,0	20.250.000	1,0	0,1
		2	<i>Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah</i>	1	135.000.000		1	528.800.000	1	27.818.694	1	499.000.000	0	-	0	1	526.818.694	1,0	1,0	1,0	528.800.000	1,0	3,9
		4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	90	23.713.120.000		92	13.930.475.000	95	2.091.219.562	95	672.774.386	0	-	0	95	2.763.993.948	1,0	0,2	92,0	13.930.475.000	1,0	0,6

		1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	750.000.000		1	0	-				0	-	-	#DIV/0!	1,0	-	1,0	-
		2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	4.668.120.000		4	1	742.702.934	1	65.692.500		1	808.395.434	0,3	0,1	4,0	6.537.600.000	1,0	1,4
		3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	120.000.000		12	0	-	1	27.200.000		0	27.200.000	-	0,1	12,0	266.000.000	1,0	2,2
		4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84	50.000.000		84	21	48.000.000	21	48.000.000		21	96.000.000	0,3	0,3	84,0	288.000.000	1,0	5,8
		5	Penyelengga raan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	14.000.000.000		12	3	-				3	-	0,3	-	12,0	1.261.825.000	1,0	0,1
		6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	125.000.000		1	0	-				0	-	-	-	1,0	40.500.000	1,0	0,3
		7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	12	4.000.000.000		12	3	1.300.516.628	2	531.881.886		3	1.832.398.514	0,3	0,3	12,0	5.536.550.000	1,0	1,4

				si Dewan																				
		5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100	2.137.450.000		100	3.101.250.000	25	1.030.014.750					25	1.030.014.750	0,3	0,3	100,0	3.101.250.000	1,0	1,5	
		1	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50	138.900.000		0	-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
		2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	1.998.550.000		3	3.101.250.000	1	1.030.014.750					1	1.030.014.750	0,3	0,3	3,0	3.101.250.000	1,0	1,6	
		6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100	127.450.000		100	63.500.000	0	-					0	-	-	-	100,0	63.500.000	1,0	0,5	
		1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	127.450.000		1	63.500.000	0	-					0	-	-	-	1,0	63.500.000	1,0	0,5	

		7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100	19.885.788.000		100	46.104.000.000	25	7.907.759.390	25	3.906.197.349					25	11.813.956.739	0,3	0,3	100	46.104.000.000	1,0	2,3
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	19.885.788.000		12	46.104.000.000	3	7.907.759.390	3	3.906.197.349					3	11.813.956.739	0,3	0,3	120	46.104.000.000	1,0	2,3
	Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	95%	55.941.001.905		100	51.945.909.338	100	14.490.091.270		7.227.955.019	0	-	0	-	100	21.718.046.289	1,0	0,4	100	51.945.909.338	105,3	0,9
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	90%	100.000.000		90	8.022.500	30	-			0	-	0	-	30	-	0,3	-	900	8.022.500	100,0	0,1
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	55.000.000		4	4.970.000	2	-			0	-	0	-	2	-	0,5	-	40	4.970.000	1,0	0,1
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2	45.000.000		2	3.052.500	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	20	3.052.500	1,0	0,1

			Perangkat Daerah																					
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	5.896.664.002		100	6.040.544.778	25	1.420.162.986	25	736.621.056	0	-	0	-	25	2.156.784.042	0,3	0,4	100,0	6.040.544.778	100,0	1,0
		<i>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>420</i>	<i>3.999.114.002</i>		<i>392</i>	<i>4.399.644.778</i>	<i>90</i>	<i>1.006.152.986</i>	<i>60</i>	<i>505.161.056</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>90</i>	<i>1.511.314.042</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>392,0</i>	<i>4.399.644.778</i>	<i>0,9</i>	<i>1,1</i>
		<i>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>12</i>	<i>1.753.550.000</i>		<i>12</i>	<i>1.521.200.000</i>	<i>3</i>	<i>399.300.000</i>	<i>2</i>	<i>216.750.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>616.050.000</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>12,0</i>	<i>1.521.200.000</i>	<i>1,0</i>	<i>0,9</i>
		<i>3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tunjangan ASN</i>	<i>12</i>	<i>144.000.000</i>		<i>12</i>	<i>119.700.000</i>	<i>3</i>	<i>14.710.000</i>	<i>2</i>	<i>14.710.000</i>					<i>3</i>	<i>29.420.000</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>12,0</i>	<i>119.700.000</i>	<i>1,0</i>	<i>0,8</i>
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan	100 %	400.000.000		100	400.000.000	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	100,0	400.000.000	100,0	1,0

			ketentuan																						
		1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	400.000.000		2	400.000.000	0	-			0	-	0	-	0	-	-	2,0	400.000.000	1,0	1,0	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85 %	3.308.400.200		87	1.652.493.200	20	119.824.500	25	291.954.570	0	-	0	-	20	411.779.070	0,2	0,2	87,0	1.652.493.200	102,4	0,5
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	126.500.000		12	124.999.000	3	-	2	40.032.870					3	40.032.870	0,3	0,3	12,0	124.999.000	1,0	1,0
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	1.950.650.200		12	507.998.200	3	4.050.000	2	87.441.715					3	91.491.715	0,3	0,2	12,0	507.998.200	1,0	0,3
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	250.750.000		12	199.996.000	3	-	2	55.625.985					3	55.625.985	0,3	0,3	12,0	199.996.000	1,0	0,8

		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	265.00 0.000		1 2	280.00 0.000	3	44.082. 000	2	14.694 .000					3	58.776. 000	0,3	0,2	12 ,0	280.00 0.000	1,0	1,1
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	715.50 0.000		1 2	539.50 0.000	3	71.692. 500	2	94.160 .000					3	165.85 2.500	0,3	0,3	12 ,0	539.50 0.000	1,0	0,8
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaa n BMD yang terealisasi	90 %	6.828. 532.82 1		9 7	1.345. 999.00 0	2 5	367.74 3.000		-					2 5	367.74 3.000	0,3	0,3	97 ,0	1.345. 999.00 0	10 7,8	0,2
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	1.200.0 00.000		0	-	0	-							0	-	#DI V/ 0!	#DI V/ 0!	-	-	-	-
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 8	5.628.5 32.821		1 6 8	1.345.9 99.000	4 2	367.74 3.000							4 2	367.74 3.000	0,3	0,3	16 8, 0	1.345.9 99.000	1,0	0,2

		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	87 %	902.488.000		90	943.331.000	25	124.140.567	25	117.625.385				25	241.765.952	0,3	0,3	90,0	943.331.000	103,4	1,0
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	8.000.000		6	4.500.000	0	-						0	-	-	-	6,0	4.500.000	1,0	0,6
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	660.260.000		12	724.081.000	3	119.415.567	2	87.997.335				3	207.412.902	0,3	0,3	12,0	724.081.000	1,0	1,1
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	234.228.000		12	214.750.000	3	4.725.000	2	29.628.050				3	34.353.050	0,3	0,2	12,0	214.750.000	1,0	0,9
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	87 %	3.783.142.240		90	2.765.400.400	25	259.508.693	25	174.055.300				25	433.563.993	0,3	0,2	90,0	2.765.400.400	103,4	0,7

		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	1.308.236.340		24	1.196.250.000	6	115.984.403	4	128.222.300					6	244.206.703	0,3	0,2	24,0	1.196.250.000	1,0	0,9
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	110.290.900		24	70.800.000	6	2.245.000	4	15.833.000					6	18.078.000	0,3	0,3	24,0	70.800.000	1,0	0,6
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1.820.865.000		5	1.046.115.000	0	-							0	-	-	-	5,0	1.046.115.000	1,0	0,6
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	168	543.750.000		168	452.235.400	42	141.279.290	28	30.000.000					42	171.279.290	0,3	0,4	168,0	452.235.400	1,0	0,8

			Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi																					
		8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100 %	34.425.389.642		100	36.540.433.460	25	11.772.619.274	25	5.785.640.308					25	17.558.259.582	0,3	0,5	100,0	36.540.433.460	100,0	1,1
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	600	33.920.389.642		600	35.956.770.960	150	11.737.619.274	150	5.374.390.308					150	17.112.009.582	0,3	0,5	600,0	35.956.770.960	1,0	1,1
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150	380.000.000		150	447.750.000	50	35.000.000	100	411.250.000					50	446.250.000	0,3	1,0	150,0	447.750.000	1,0	1,2
		3	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	125.000.000		50	135.912.500	0	-							0	-	-	-	50,0	135.912.500	1,0	1,1
		9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitas aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100 %	296.385.000		100	2.249.685.000	25	426.092.250		122.058.400					25	548.150.650	0,3	0,2	100,0	2.249.685.000	100,0	7,6

		1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	-			2	900.000.000	2	289.750.000					2	289.750.000	1,0	0,3	2,0	900.000.000	-	-
		2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	296.385.000			2	1.349.685.000	2	136.342.250		122.058.400			2	258.400.650	1,0	0,2	2,0	1.349.685.000	1,0	4,6
		JUMLAH ANGGARAN							117.719.779.338		25.672.988.966		12.305.926.754				37.978.915.720						

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memberikan pelayanan pembantuan kepada Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yaitu merumuskan dan merencanakan segala kebutuhan kegiatan DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan membawahi Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Keuangan. Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
2. Benturan kepentingan yang seringkali terjadi menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
3. Kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja aparat masih rendah, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut dapat mempengaruhi kinerja staf, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Apabila tidak segera diatasi akan berpengaruh terhadap tercapainya sasaran dari setiap program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasuruan.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Menjalinkan komunikasi intensif dan baik diantara partai, dengan fraksi fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait terkait berbagai regulasi atau kebijakan yang akan ataupun sedang berjalan;
3. Memenuhi kebutuhan formasi Sumber Daya Aparatur yang kurang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Pasuruan demi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 menetapkan tujuan memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya yaitu “Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD “. Sedangkan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah, Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi							
	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi							
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan : Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD	IKU	-	87,35	80	88	Hasil Desk Forum Perangkat Daerah Tanggal 24 April 2025
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	Indikator : Indeks Kepuasan Anggota DPRD						
		Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas layanan kepada DPRD	IKU	Persentase	100	93	100	
		Indikator : Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi						
		Sasaran : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IKU	Nilai	78,10	78,16	78,16	
		Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah						

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome dan output saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PPD 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital (Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.250.000	3.101.250.000	3	3	1	1.030.014.750	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.101.250.000	3.101.250.000	3	3	1	1.030.014.750	
			Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	3.101.250.000	3.101.250.000	3	3	1	1.030.014.750	

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

N O	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMB ER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBA HAN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TAR GET IK	PAGU RP	TAR GET IK	PAGU RP	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TAR GET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										Pergeseran 1 + Refocusing				EFISIENSI
	Bidang Urusan Sekretariat DPRD														
	UNSUR (pendukung/penunjang/Pengawasan/Kewilayahan/Pemerintahan Umum)		Y												
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana	95%	51.675.823.800	95%	65.773.870.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana	95%	40.824.415.000		95%	- 24.949.455.000	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80%	2.175.860.800	80%	678.145.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah raperda yang disahkan menjadi perda	80%	628.145.000		80%	- 50.000.000	

		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	926.560.800	12 Dokumen	43.845.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	43.845.000		12 Dokumen	-	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	324.300.000	8 Dokumen	324.300.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	324.300.000		8 Dokumen	-	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	780.000.000	12 Dokumen	260.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	260.000.000		12 Dokumen	-	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	-		0 Dokumen	- 50.000.000	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pengesahan APBD Tepat Waktu	95%	2.690.335.000	95%	1.347.450.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pengesahan APBD Tepat Waktu	95%	1.347.450.000		95%	-	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	163.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	163.000.000		1 Dokumen	-	

		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	161.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	161.000.000		1 Dokumen	-	
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	2.000.000.000	28 Dokumen	368.700.000	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	368.700.000		28 Dokumen	-	
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	371.950.000	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	371.950.000		1 Dokumen	-	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	275.335.000	1 Dokumen	282.800.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	282.800.000		1 Dokumen	-	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	275.000.000	100 %	549.050.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	528.800.000		100%	- 20.250.000	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	20.250.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	-		0 Dokumen	- 20.250.000	

		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	528.800.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	528.800.000		1 Dokumen	-	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	90%	23.713.120.000	90%	13.930.475.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase kesertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kapasitas	90%	12.103.270.000		90%	-1.827.205.000	
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	-	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	-	
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4.668.120.000	4 Dokumen	6.537.600.000	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	6.419.520.000		4 Dokumen	-118.080.000	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	120.000.000	8 orang	266.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	266.000.000		8 orang	-	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	50.000.000	7 Orang	288.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	288.000.000		7 Orang	-	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	14.000.000.000	12 Dokumen	1.261.825.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	-1.061.825.000	
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	40.500.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	40.500.000		1 Dokumen	-	

		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.000.000.000	12 Dokumen	5.536.550.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	4.889.250.000		12 Dokumen	- 647.300.000	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100 %	2.137.450.000	100 %	3.101.250.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diinput di SIPD	100 %	3.101.250.000		100%	-	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50 Dokumen	138.900.000	50 Dokumen	-	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	50 Dokumen	-		50 Dokumen	-	
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.998.550.000	3 Dokumen	3.101.250.000	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.101.250.000		3 Dokumen	-	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 %	127.450.000	100 %	63.500.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 %	63.500.000		100%	-	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	127.450.000	1 Dokumen	63.500.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	63.500.000		1 Dokumen	-	
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100 %	20.556.608.000	100 %	46.104.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Kunjungan Kerja DPRD yang terfasilitasi	100 %	23.052.000.000		100%	- 23.052.000.000	

		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	20.556.608.000	12 Dokumen	46.104.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	23.052.000.000		12 Dokumen	- 23.052.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	95%	55.270.181.905	95%	51.945.909.338	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	95%	51.014.489.453		95%	- 931.419.885	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	90%	95.000.000	90%	8.022.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi	90%	8.022.500		90%	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	4.970.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.970.000		4 Dokumen	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	40.000.000	2 laporan	3.052.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	3.052.500		2 laporan	-	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100 %	5.896.664.002	100 %	6.040.544.778	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan	100 %	5.643.189.981		100%	- 397.354.797	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.999.114.002	364/tahun	4.399.644.778	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364/tahun	3.872.289.981		364/tahun	- 527.354.797	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	1.753.550.000	12 Dokumen	1.521.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	1.651.200.000		12 Dokumen	130.000.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	144.000.000	12 Dokumen	119.700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.700.000		12 Dokumen	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100 %	400.000.000	100 %	400.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100 %	400.000.000		100%	-	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	400.000.000		2 Dokumen	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85%	3.302.550.200	85%	1.652.493.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	85%	1.270.749.150		85%	- 381.744.050	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.800 .000	12 Paket	124.99 9.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	93.659. 000		12 Paket	- 31.340. 000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.950.6 50.200	12 Paket	507.99 8.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	385.24 3.150		12 Paket	- 122.755 .050	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	245.600 .000	12 Paket	199.99 6.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.34 7.000		12 Paket	- 49.649. 000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	265.000 .000	12 Doku men	280.00 0.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	180.00 0.000		12 Dokumen	- 100.000 .000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	715.500 .000	12 Lapor an	539.50 0.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	461.50 0.000		12 Laporan	- 78.000. 000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	90%	6.178.5 32.821	90%	1.345. 999.00 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	90%	1.345. 999.00 0		90%	-	

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	550.000.000	5 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	-		5 Unit	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	168 unit	5.628.532.821	168 unit	1.345.999.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	168 unit	1.345.999.000		168 unit	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	87%	892.518.000	87%	943.331.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	87%	913.483.000		87%	-29.848.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	8.000.000	6 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	4.500.000		6 Laporan	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.290.000	12 Laporan	724.081.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	724.081.000		12 Laporan	-	

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	234.228 .000	12 Lapor an	214.75 0.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	184.90 2.000		12 Laporan	- 29.848. 000	
		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase BMD kondisi baik	87%	3.783.1 42.240	87%	2.765. 400.40 0	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase BMD kondisi baik	87%	2.695. 800.40 0		87%	- 69.600. 000	
		Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	1.308.2 36.340	24 Unit	1.196.2 50.000	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	1.196.2 50.000		24 Unit	-	
		Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	110.290 .900	24 Unit	70.800. 000	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	70.800. 000		24 Unit	-	
		Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	1.820.8 65.000	5 Unit	1.046.1 15.000	Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	5 Unit	976.51 5.000		5 Unit	- 69.600. 000	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	168 Unit	543.750.000	168 Unit	452.235.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	168 Unit	452.235.400		168 Unit	-	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100 %	34.425.389.642	100 %	36.540.433.460	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kebutuhan operasional anggota DPRD yang terpenuhi	100 %	36.547.560.422		100%	7.126.962	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang.Bulan	33.920.389.642	50 Orang.Bulan	35.956.770.960	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang.Bulan	35.962.442.922		50 Orang.Bulan	5.671.962	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	380.000.000	150 Paket	447.750.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	447.750.000		150 Paket	-	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	125.000.000	50 Orang	135.912.500	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	137.367.500		50 Orang	1.455.000	
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitas aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100 %	296.385.000	100 %	SS	Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitas aktifitas anggota DPRD yg terpenuhi	100 %	2.189.685.000		100%	-60.000.000	
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	900.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen	900.000.000		2 Dokumen	-	

		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Doku men	296.385 .000	2 Doku men	1.349.6 85.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Doku men	1.289.6 85.000		2 Dokumen	- 60.000. 000	
	TOTAL				106.94 6.005.7 05		117.71 9.779.3 38				91.838. 904.45 3			- 25.880.8 74.885	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan perubahan Renja ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan

PIH. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN



Dr. EDDY SUPRIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1965122019931007